



► **PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

Ada Korban TPPO, Peran Gugus Tugas Dimaksimalkan

UMBULHARJO—Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja mencatat sepanjang 2023 ada lima orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau *trafficking*.

Affi Annissa Karlin
affi@harianjogja.com

Data ini diambil dari siga.jogjapro.go.id dan tercatat pada lembaga layanan di Kota Jogja. Sepanjang 2024, tak ada kasus *trafficking* yang terjadi di Kota Jogja.

Kepala DP3AP2KB Kota Jogja, Retnaningtyas, menuturkan kelima korban merupakan perempuan. Mereka mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan. Dia menambahkan, pelaku kejahatan seringkali menggunakan kekerasan fisik, psikologis, dan seksual untuk mengendalikan korban. "Profil korban TPPO sangat beragam, namun umumnya mereka berasal

► Kelima korban mengalami eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan.

► GT PP TPPO ini berperan untuk mencegah dan menangani korban TPPO di Kota Jogja.

dari kelompok rentan," kata Retna. Menurutnya, DIY sering menjadi tempat transit TPPO. Tingginya permintaan terhadap tenaga kerja murah dan eksploitasi seksual menjadi faktor pendorong utama. Jaringan kejahatan transnasional yang kuat dan kompleks membuat pemberantasan TPPO menjadi tantangan yang besar.

Retna mengatakan, Kota Jogja memiliki Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP TPPO), terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta lembaga layanan yang bergerak di bidang pencegahan dan penanganan TPPO.

Retna menuturkan, GT PP TPPO ini berperan untuk mencegah dan menangani korban TPPO di Kota Jogja. Meski demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan perubahan modus operandi pelaku yang semakin beragam. "Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dan sinergi lintas sektor untuk memperkuat upaya

pencegahan dan penanganan TPPO serta memastikan perlindungan pekerja migran Indonesia yang lebih efektif," katanya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Jogja, Yunianto Dwi Sutono, mengatakan ada sebagian warga Kota Jogja yang bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Untuk itu, koordinasi lintas sektor penting dilakukan sebagai langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan TPPO, sekaligus memastikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, khususnya warga Kota Jogja.

"Kami siap bekerja sama dengan instansi terkait, baik di level nasional maupun internasional untuk memperkuat kebijakan dan langkah konkret dalam pencegahan TPPO, sehingga harapannya bahaya perdagangan orang dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat diperkuat pengawasannya di lapangan dan dilakukan penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku TPPO," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005